

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 yang merupakan Dokumen Perencanaan dimasa transisi atau kekosongan Kepala Daerah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 – 2022, sementara Pemilihan Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Berdasarkan amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 diatas maka Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan turunan RPD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026. Oleh karena itu, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat menyusun Dokumen Renstra yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan program pembangunan Kabupaten Lampung Barat dibidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Beberapa isu strategis dibidang pembangunan sektor ekonomi adalah fokus pada pemulihan dan penguatan ekonomi pasca bencana non alam covid 19, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengeluaran perkapita hingga peran strategis sektor ekonomi dalam penurunan angka kemiskinan daerah. Hal ini tentu membutuhkan strategi yang matang mengingat kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidaklah terlalu besar, sehingga strategi yang disusun harus benar – benar memperhitungkan dengan detail dan dikaitkan dengan kemampuan fiskal daerah.

Penyusunan Renstra OPD tahun 2023 – 2026 murni menggunakan sistem teknokratik, berbeda dengan renstra OPD sebelumnya yang sangat terkait

dengan janji politik Kepala Daerah terpilih, sehingga penyusunan dokumen renstra langsung mengarah pada permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_8552 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya renstra Dinas Koperindag kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, dan target kinerja organisasi kinerja OPD.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung dalam menjalankan organisasinya;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan Rencana Kerja selama 4 (empat) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berorientasi hasil.
3. Memudahkan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan kontrol terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

#### 2.1.1. Tugas OPD

Berkaitan dengan urusan wajib maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat menangani urusan koperasi UKM sedangkan untuk urusan pilihan menangani urusan perindustrian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan regulasi diatas, maka Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat mempunyai kedudukan dan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### 2.1.2 Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas koperasi usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.1.2.1 SEKRETARIAT DINAS

(1) Sekretariat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, Sekretariat dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan Tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi ;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup sekretariat dinas.

#### 2.1.2.2 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM), menyiapkan perumusan kebijakan teknis Pembinaan, Penyiapan bahan dan proses pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar (PAD), Pebubaran, Amalgamasi (Penggabungan / Penyatuan Koperasi), serta ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Koperasi.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi dan UMKM;
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM;
  - c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Kegiatan di bidang Koperasi dan UMKM;
  - d. Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di bidang Koperasi dan UMKM;

#### 2.1.2.3. BIDANG INDUSTRI

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas, Membina, Mengembangkan, Mengkoordinasikan, dan, Menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di Bidang Industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bidang Industri mempunyai Fungsi
- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di Bidang Industri
  - b. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Industri
  - c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Kegiatan di Bidang Industri dan,
  - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Industri

#### 2.1.2.4. BIDANG PERDAGANGAN

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. dibidang Perdagangan meliputi perdagangan dalam dan luar negeri, pembinaan bina usaha dan promosi dagang serta tertib niaga dan Metrologi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang perdagangan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perdagangan.

#### 2.1.2.5. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

(1) Bidang Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. dibidang Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.

#### **2.1.3 Struktur Organisasi OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

- (1) a. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - b. Kepala Dinas;
  - c. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
    - 3. Fungsional Perencana

- d. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi :
  - 1. Fungsional Pengawas Koperasi;
- e. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - 1. Fungsional Assesor Managemen Mutu Industri
  - 2. Fungsional Penyuluh Industri
- f. Bidang Perdagangan, membawahi :
  - 1. Fungsional Penjamin Mutu Produk
  - 2. Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
  - 3. Fungsional Pengawas Kemetrolgian
- g. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, membawahi :
  - 1. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
  - 2. Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## 2.2 Sumber Daya OPD

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sampai dengan bulan Februari 2022 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Dengan komponen pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada TABEL 2.1 dan TABEL 2.2 berikut ini :

#### **Komposisi Pegawai Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Pangkat/Golongan**

<b>No</b>	<b>Pangkat/Gol.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
1	Golongan IV	5	
2	Golongan III	24	
3	Golongan II	2	
4	Golongan I	0	
<b>J U M L A H</b>		<b>31</b>	

**Sumber :Data Kepegawaian Dinas Koperindag ; 2022**



**Komposisi Pegawai Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket.</b>
1	Pasca Sarjana/S2	6 orang	
2	Sarjana/S1	22 orang	
3	Sarjana Muda/Diploma III	1 orang	
4	SLTA	2 orang	
5	SLTP	0 orang	

**Sumber :Data Kepegawaian Dinas Koperindag ; 2022**

Aparatur pemerintah merupakan inti organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan organisasi ini hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional. Sedemikian penting dan strategisnya peran aparatur dalam penyelenggaraan manajemen sumberdaya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Akan tetapi saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas, Aparatur Sipil Negara yang ada di OPD ini belum berada pada kondisi yang diharapkan. Secara kuantitas jumlah Aparatur 29 personil dengan tugas dan kewajiban membawahi 3 urusan pemerintahan belumlah memadai, sehingga banyak ASN yang melaksanakan tugas tambahan yang sama banyak dengan tugas pokoknya. Secara kualitas, ASN yang ada perlu dilakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Namun dengan kondisi yang ada OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat akan terus berupaya melakukan optimalisasi peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Disamping sumber daya diatas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat memiliki Unit Perlaksana Teknis yakni Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan perguliran permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Selain itu terdapat satu unit usaha pelayanan desain dan cetak kemasan bagi IKM yang dilaksanakan oleh Lamban Kemasan.

### **2.3 Kinerja Pelayanan OPD**

Jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 berjumlah 165 unit, dengan rincian koperasi aktif sebanyak 53 unit, koperasi tidak aktif sebanyak 38 unit, koperasi dalam status proses pembubaran sebanyak 74 unit koperasi. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan usahanya dengan aktif, dari 53 koperasi yang aktif tersebut tercatat 27 unit koperasi yang dinyatakan sehat baik secara kelembagaan maupun keberlangsungan usaha. Adapun koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan adalah koperasi yang sudah tidak ada lagi aktifitas usaha, bahkan kepengurusan sudah tidak berjalan lagi. Usulan pembubaran saat ini sedang diproses di Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia

Pada sektor UMKM, kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat adalah pada bagaimana meningkatkan perekonomian daerah lewat pemberdayaan UMKM, diantaranya pertumbuhan UMKM dan fasilitasi pembiayaan atau kemitraan UMKM pada instansi penyalur permodalan. Pada akhir tahun 2021 tercatat bahwa UMKM Kabupaten Lampung Barat berjumlah 8.747 unit usaha yang tersebar diberbagai sektor seperti perdagangan, industri pengolahan, jasa, kuliner, dan lain sebagainya. Adapun untuk fasilitasi pembiayaan tercatat 812 unit usaha yang telah mendapatkan fasilitasi pembiayaan baik sektor perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan Program Dana Bergulir melalui UPT Perkuatan Permodalan Koperasi UMKM.

Pada sektor perdagangan, Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah bagaimana meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan. Berdasarkan Data BPS per 25 Februari 2022 tercatat bahwa PDRB Sektor Perdagangan adalah senilai 961.79 milyar rupiah, menguat dibanding tahun sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi akibat pandemi covid 19. Upaya pemulihan ekonomi nasional, peningkatan pengeluaran masyarakat, peningkatan jumlah unit SPBU di Kabupaten Lampung Barat menjadi faktor peningkatan PDRB Sektor Perdagangan. Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Koperindag di sektor perdagangan antara lain menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting, penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan promosi produk Koperasi dan UMKM serta peningkatan kualitas perlindungan konsumen dengan optimalisasi kemetrolgian.

Selanjutnya pada sektor perindustrian, peran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah bagaimana upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi lampung barat melalui peningkatan PDRB Sektor Perindustrian. Pada tahun 2021 berdasarkan Data BPS Lampung Barat yang dipublikasi pada tanggal 22 Februari 2022

adalah sebesar 400.61 milyar rupiah. Sebagaimana sektor perdagangan, PDRB sektor industri juga mengalami pertumbuhan positif, dimana pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi akibat pandemi covid 19, saat ini sudah mengalami perbaikan sebagai buah dari upaya pemulihan ekonomi daerah, serta semakin membaiknya penanganan pandemi dan juga didukung mulai bergeliatnya sektor pariwisata yang berdampak positif pada pertumbuhan dan peningkatan produktivitas UMKM sektor Industri Pengolahan. Beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan PDRB Sektor Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah pembinaan IKM baik pada sektor perizinan maupun sertifikasinya, bantuan alat produksi, optimalisasi sentra IKM, sampai pengembangan produk. Berikut disajikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat :

Tabel 1.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah Koperasi Sehat	11	17	22	23	25	11	17	22	27		100%	100%	100%	117%	
2	Persentase Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	67%	67.4%		100%	100%	670%	674%	
3	PDRB Sektor Perdagangan	806,05	870,03	875,03	887,43	905,17	806,05	910,58	948,40	961,79		100%	104.6%	106.87%	106.25%	
4	PDRB Sektor Industri Pengolahan	320,55	364,09	351,35	358,37	365,57	320,55	364,09	351,35	400,61		100%	100%	100%	111.78%	

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Perencanaan Pembangunan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 secara umum merupakan kelanjutan dari perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun – tahun sebelumnya banyak capaian kinerja yang telah dicapai organisasi ini, namun masih banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian perencanaan terkait dengan isu – isu yang berkembang dan tuntutan masyarakat di bidang Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Badan usaha koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ternyata belum optimal dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya unit usaha yang dipilih oleh koperasi, mayoritas koperasi di Lampung Barat memilih unit simpan pinjam sebagai unit usahanya, sehingga belum menggerakkan ekonomi sektor riil.

Pada sektor UMKM isu strategis yang berkembang di Kabupaten Lampung Barat adalah terkait dengan daya saing UMKM. Secara umum teknik pengelolaan usaha UMKM masih perlu percepatan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha saat ini, sebagai dampak revolusi industri 4.0 bahkan sedang menuju 5.0, terutama dari sisi variasi jenis produk maupun layanan, pemasaran bahkan permodalan bagi UMKM.

Beberapa permasalahan ekonomi yang muncul ditengah masyarakat yang utama adalah kondisi ekonomi daerah yang mengalami penurunan pertumbuhan sebagai imbas kondisi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak bencana non alam pandemi covid 19 yang mengakibatkan harus dihentikan atau dibatasinya aktivitas ekonomi sebagai imbas kebijakan pembatasan aktivitas sosial berskala besar yang berlaku secara nasional bahkan dunia dalam kurun waktu tahun 2020 – 2021. Tahun 2020 merupakan tahun dimana kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi skala nasional dan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat, meskipun kabupaten ini termasuk kabupaten yang resisten terhadap resesi ekonomi karena menggantungkan kehidupan ekonomi daerahnya pada sektor pertanian,

namun sektor perdagangan dan perindustrian menjadi dua sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan. BPS Lampung Barat mencatat pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan PDRB Lampung Barat di sektor perdagangan adalah sebesar -6.64% dan sektor industri pengolahan - 5,07%.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat menjadi tumbuh positif di angka 2,58%, dimana PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan juga mengalami laju pertumbuhan yang positif yakni 8,88% untuk sektor perdagangan dan 5,36% untuk sektor industri pengolahan.

Dalam menjawab isu – isu strategis yang berkembang tersebut Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat membutuhkan sebuah pemikiran yang matang dan mendalam, membutuhkan strategi bagaimana merumuskan dan menyelesaikan permasalahan di sektor ekonomi sehingga bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang mampu menjawab setiap isu yang berkembang. Akan tetapi, dalam melaksanakan hal tersebut tentu diperlukan sumber daya pendukung baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan yang mendukung. Oleh karena itu, sumber daya pendukung juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan dokumen perencanaan strategis tahun 2023 – 2026. Secara ringkas, permasalahan – permasalahan diatas diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL 1.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hadirnya koperasi belum terlihat memberikan dampak nyata pada peningkatan perekonomian masyarakat di</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan daya saing UMKM</li> </ul>	<p>Kabupaten Lampung barat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik pengelolaan usaha yang perlu percepatan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha saat ini, sebagai dampak revolusi industri 4.0 bahkan sedang menuju 5.0, terutama dari sisi variasi jenis produk maupun layanan, pemasaran bahkan permodalan bagi UMKM</li> </ul>
2	Urusan Pilihan Perdagangan	Pemulihan ekonomi sektor perdagangan	<p>Sektor Perdagangan adalah sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, menjadi penopang pemasaran produk koperasi dan UMKM, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor</p>

			<p>perdagangan. Akan tetapi selama pandemi covid 19 banyak penurunan disub sektor - sub sektor tersebut, diantaranya penurunan penjualan produk UMKM sektor Industri Kecil Menengah, penurunan PAD Kabupaten Lampung Barat sektor Perdagangan, serta masih tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas alat ukur yang digunakan oleh pelaku usaha perdagangan.</p> <p>Kondisi diatas memerlukan upaya yang tepat terkait bagaimana daerah mengambil kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat dan daerah secara umum</p>
--	--	--	---



3	Urusan Pilihan Perindustrian	Pemulihan ekonomi sektor industri pengolahan	Industri Kecil Menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah. Naiknya minat masyarakat mengolah bahan komoditas menjadi barang setengah jadi maupun rang jadi yang memiliki nilai tambah. Akan tetapi selama dua tahun belakangan terjadi penurunan penjualan produk IKM selain sebagai dampak pandemi covid 19 juga rendahnya daya saing produk IKM Kabupaten Lampung Barat, untuk itu diperlukan langkah dan kebijakan pemulihan ekonomi pasca bencana non alam tersebut
---	------------------------------	--	--

### 3.2 Penentuan Isu Strategis OPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat diatas maka selanjutnya permasalahan diatas akan diuraikan dikaitkan dengan isu – isu stategis yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Isu – isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

- a. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Keberadaan usaha koperasi sebagai Badan Hukum resmi yang diakui negara merupakan bukti keseriusan pemerintah membangun ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong. Namun sangat disayangkan Hadirnya koperasi belum terlihat memberikan dampak nyata pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung barat. Permasalahan ini disebabkan banyak hal, diantaranya pengelolaan kelembagaan koperasi yang belum sesuai aturan, pemilihan sektor usaha yang masih didominasi usaha simpan pinjam, sampai pada pembentukan unit koperasi yang hanya untuk kepentingan tertentu seperti mengakses program pemerintah saja.

Berdasarkan data keragaan Koperasi yang disusun Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 tercatat jumlah koperasi di Lampung Barat sebanyak 165 unit, dengan kondisi 53 unit koperasi aktif, 38 unit koperasi tidak aktif, 74 koperasi dalam status diusulkan untuk dibubarkan. Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup serius bagi Dinas Koperindag Lampung Barat, diperlukan kebijakan yang tepat agar Koperasi di Kabupaten Lampung Barat bisa memberikan dampak dan menjadi solusi perekonomian masyarakat dan daerah

- b. Sektor UMKM adalah sektor yang sangat strategis dalam menopang ekonomi daerah. Kabupaten Lampung barat masih menggantungkan pertumbuhannya pada sektor pertanian, untuk itu salah satu strategi yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah menggerakkan sektor usaha yang sifatnya menghasilkan produk baru dari bahan mentah atau komoditas. Untuk itu diperlukan sebuah upaya untuk mendorong pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Pokok permasalahan UMKM Kabupaten Lampung Barat adalah permodalan dan pemasaran. Dua hal ini menjadi konsentrasi kebijakan pemerintah sehingga UMKM bisa naik kelas dan menjadi penopang ekonomi daerah bahkan nasional.

## 2. Urusan Pilihan Perdagangan

Berbicara masalah perdagangan, isu strategis yang berkembang adalah permasalahan kontribusi sektor perdagangan. Adapun hal yang menjadi pendukung peningkatan PDRB sektor perdagangan antara lain perlindungan konsumen, merupakan satu diantara kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Iklim usaha yang sehat harus didukung oleh tingkat persaingan usaha yang sehat dan juga meminimalisir pelanggaran hak – hak konsumen. Konsumen yang cerdas dan terlindungi merupakan bagian dari permasalahan yang ada dan harus dilakukan upaya strategis untuk mewujudkannya, melalui kebijakan optimalisasi tertib niaga. Selanjutnya hal krusial untuk mendukung PDRB sektor perdagangan adalah masalah ketersediaan stok hingga stabilitas harga merupakan isu penting dalam kebijakan perdagangan dalam negeri. Pemerintah harus hadir dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi – kondisi tertentu, seperti saat masa gagal panen, masa menjelang dan saat bulan Ramadhan serta Hari Raya dan Tahun Baru dimana trend yang terjadi adalah kelangkaan barang dan kenaikan harga. Selain itu, permasalahan harga komoditas pertanian juga menjadi hal yang sangat krusial dalam perekonomian Lampung Barat, untuk itu pemutusan mata rantai distribusi barang komoditas pertanian menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas harga – harga komoditas tersebut.

## 3. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Perindustrian merupakan satu dari berbagai sektor usaha bagi UKM. Kabupaten Lampung Barat bukan merupakan wilayah pengembangan industri skala besar, mengingat 65% wilayahnya merupakan daerah konservasi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang harus tetap lestari. Akan tetapi Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil bahan baku industri agro yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Kabupaten Lampung Barat adalah wilayah pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis agroindustri. Jumlah IKM

Kabupaten Lampung Barat per Desember 2021 adalah 823 IKM yang tersebar di Kecamatan – Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Pertumbuhan dan peningkatan omset IKM diharapkan mampu untuk meningkatkan share PDRB sektor industri di Lampung Barat, yang artinya akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan peningkatan omset IKM tersebut.

Adapun keterkaitan permasalahan dan isu strategis OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

No	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD	Penentuan Isu – isu strategis
1.	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	
	- Hadirnya koperasi belum terlihat memberikan dampak nyata pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lampung barat	- Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi
	- Teknik pengelolaan usaha yang perlu percepatan penyesuaian dengan perkembangan dunia usaha saat ini, sebagai dampak revolusi industri 4.0 bahkan sedang menuju 5.0, terutama dari sisi variasi jenis produk maupun layanan, pemasaran bahkan permodalan bagi UMKM	- Rendahnya kualitas dan daya saing UMKM
2.	Urusan Pilihan Perdagangan	
	- Perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan akibat bencana non alam pandemi covid 19	- Pemulihan ekonomi sektor perdagangan
3.	Urusan Pilihan Perindustrian	

	- Perlambatan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan akibat bencana non alam pandemi covid 19	- Pemulihan ekonomi sektor perdagangan
--	---	--

### 3.3 Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian dan perdagangan, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha perindustrian dan perdagangan kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

#### 1. Prioritas Nasional

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan Koperasi UKM, perindustrian dan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Kebijakan Nasional

NO	KEBIJAKAN	SUMBER	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	Renstra Koperasi UKM	
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu berdaya saing di pasar Domestik dan Global		
3	Terwujudnya kementerian koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi		
1	Kebijakan pengembangan sumber daya industri	Renstra Kementerian Perindustrian	
2	Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri		
3	Kebijakan pemberdayaan industri		
4	Kebijakan pengembangan perwilayahan industri produk nasional		
5	Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal		
6	Kebijakan reformasi birokrasi		

### 3.5 Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi
2. Meningkatnya peyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaku koperasi
3. Meningkatnya tata kelola kinerja koperasi yang profesional
4. Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri
5. Menigkatnya jumlah UKM yang dibina, dan
6. Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM
7. Pemantauan harga bahan pangan pokok penting
8. Peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen
9. Pertumbuhan ekspor melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan :Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan
3. Meningkatnya PDRB Sektor Industri

### Rencana target Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.1 Target Pencapaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kontribusi subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita	% Koperasi yang Sehat	19%	22%	25%	28%
		Persentase Pertumbuhan UMKM	10%	10%	10%	10%
		PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	923.27	941.73	960.56	979.77
		PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	372.88	380.33	387.93	395.68



Tabel 4.2 Target Pencapaian Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
				2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kontribusi subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	% Koperasi yang Sehat	30%	32%	33%	34%
			Persentase Pertumbuhan UMKM	10%	20%	30%	40%
			% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	3%	6%	9%	12%
2.		Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	923.27	941.73	960.56	979.77
3.		Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	372.88	380.33	387.93	395.68

### 4.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, diperlukan langkah – langkah strategis dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dari kebijakan yang diambil. Adapun strategi OPD Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan daya saing Koperasi dan UMKM, melalui kebijakan :
  - a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi
  - b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - c. Peningkatan Kualitas Produk UMKM
  - d. Peningkatan Wirausaha pemula
2. Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, dengan kebijakan :
  - a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.
  - b. Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas
  - c. Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP
  - d. Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, dengan kebijakan, dengan kebijakan :
  - a. Penumbuhan dan pengembangan IKM
  - b. Peningkatan omset IKM

<b>Sasaran RPD : MENINGKATNYA PENDAPATAN PERKAPITA</b>				
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya Kontribusi subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkapita	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas dan daya saing koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi</li> <li>b. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Produk UMKM</li> <li>d. Peningkatan Wirausaha pemula</li> </ul>
		Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.</li> <li>b. Stabilisasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok, Barang Penting dan Komoditas</li> <li>c. Optimalisasi tertib niaga dan perlindungan konsumen melalui peningkatan pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTP</li> <li>d. Peningkatan Penjualan Produk Koperasi dan UMKM</li> </ul>
		Meningkatnya PDRB Sektor Industri	Peningkatan PDRB Sektor Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penumbuhan dan pengembangan IKM</li> <li>b. Peningkatan omset IKM</li> </ul>

# BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 1.1 Rencana Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat adalah sebagai berikut:

### A. Urusan Wajib Koperasi UKM

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

##### **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

##### **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

**Peningkatan Pelayanan BLUD**

- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

- a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**

- a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

#### PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI

##### **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

#### PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

##### **Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- d. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- e. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

#### PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

##### **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**

- a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

#### PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

##### **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

- a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

##### **Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya**

- a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

#### PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

##### **Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota**

- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
- b. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

##### **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan
- b. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

#### PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

##### **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang
- b. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

#### PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

##### **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

- a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

Tabel 6.1

Tabel Detail Sub Kegiatan Tahun 2023-2026

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
2.17.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
2.17.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Administrasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Administrasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Administrasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi	Administrasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen RKA-SKPD
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Administrasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi penyusunan evaluasi perangkat daerah	Administrasi penyusunan evaluasi perangkat daerah	Administrasi penyusunan evaluasi perangkat daerah	Administrasi penyusunan evaluasi perangkat daerah
2.17.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Administrasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Administrasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Administrasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Administrasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
2.17.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Administrasi penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
2.17.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
2.17.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit selama satu tahun	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit selama satu tahun	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit selama satu tahun	Penyusunan rencana kebutuhan barang unit selama satu tahun
2.17.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan asuransi ruko milik Pemda	Penyediaan asuransi ruko milik Pemda	Penyediaan asuransi ruko milik Pemda	Penyediaan asuransi ruko milik Pemda
2.17.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
2.17.01.2.05.09	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja pegawai	Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja pegawai	Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja pegawai	Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja pegawai
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman peserta diklat pegawai sebanyak 2 orang	Pengiriman peserta diklat pegawai sebanyak 2 orang	Pengiriman peserta diklat pegawai sebanyak 2 orang	Pengiriman peserta diklat pegawai sebanyak 2 orang
2.17.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan instalasi listrik kantor (kabel, lampu,dll) 1 paket	Pengadaan instalasi listrik kantor (kabel, lampu,dll) 1 paket	Pengadaan instalasi listrik kantor (kabel, lampu,dll) 1 paket	Pengadaan instalasi listrik kantor (kabel, lampu,dll) 1 paket
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop, komputer, dll	Pengadaan Laptop, komputer, dll	Pengadaan Laptop, komputer, dll	Pengadaan Laptop, komputer, dll
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Langganan surat kabar selama 1 tahun dan kegiatan publikasi OPD	Penyediaan Langganan surat kabar selama 1 tahun dan kegiatan publikasi OPD	Penyediaan Langganan surat kabar selama 1 tahun dan kegiatan publikasi OPD	Penyediaan Langganan surat kabar selama 1 tahun dan kegiatan publikasi OPD
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan kudapan untuk sajian tamu dinas	Penyediaan kudapan untuk sajian tamu dinas	Penyediaan kudapan untuk sajian tamu dinas	Penyediaan kudapan untuk sajian tamu dinas
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan dinas	Biaya Perjalanan dinas	Biaya Perjalanan dinas	Biaya Perjalanan dinas
2.17.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel berupa meja resepsionis/front office	Pengadaan mebel dinas sesuai kebutuhan	Pengadaan mebel dinas sesuai kebutuhan	Pengadaan mebel dinas sesuai kebutuhan
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya (mesin penghancur kertas,dll)	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
2.17.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				

2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Administrasi Jasa Surat menyurat	Penyediaan Administrasi Jasa Surat menyurat	Penyediaan Administrasi Jasa Surat menyurat	Penyediaan Administrasi Jasa Surat menyurat
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya langganan telpon, internet dan air	Biaya langganan telpon, internet dan air	Biaya langganan telpon, internet dan air	Biaya langganan telpon, internet dan air
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi operasional rutin	Administrasi operasional rutin	Administrasi operasional rutin	Administrasi operasional rutin
2.17.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya BBM, perizinan dan servis kendaraan dinas	Biaya BBM, perizinan dan servis kendaraan dinas	Biaya BBM, perizinan dan servis kendaraan dinas	Biaya BBM, perizinan dan servis kendaraan dinas
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan komputer, printer, laptop dll	Pemeliharaan komputer, printer, laptop dll	Pemeliharaan komputer, printer, laptop dll	Pemeliharaan komputer, printer, laptop dll
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pemeliharaan rutin bangunan kantor	Pemeliharaan rutin bangunan kantor	Pemeliharaan rutin bangunan kantor	Pemeliharaan rutin bangunan kantor
<b>2.17.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional BLUD bersumber pendapatan Jasa BLUD	Operasional BLUD bersumber pendapatan Jasa BLUD	Operasional BLUD bersumber pendapatan Jasa BLUD	Operasional BLUD bersumber pendapatan Jasa BLUD
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota				
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Penilaian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan kepatuhan lembaga koperasi terhadap undang - undang dan regulasi koperasi. Termasuk Rakor Koperasi tingkat kabupaten	Penilaian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan kepatuhan lembaga koperasi terhadap undang - undang dan regulasi koperasi. Termasuk Rakor Koperasi tingkat kabupaten	Penilaian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan kepatuhan lembaga koperasi terhadap undang - undang dan regulasi koperasi. Termasuk Rakor Koperasi tingkat kabupaten	Penilaian, pengawasan, pembinaan pelaksanaan dan kepatuhan lembaga koperasi terhadap undang - undang dan regulasi koperasi. Termasuk Rakor Koperasi tingkat kabupaten
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial	Pelatihan peningkatan kemampuan manajerial

	Kompetensi SDM Koperasi	pengelolaan koperasi	pengelolaan koperasi	pengelolaan koperasi	pengelolaan koperasi
2,17,06	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KOPERASI</b>				
2,17,06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
2,17,06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM	Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM	Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM	Pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>				
<b>2.17.07.2.01</b>	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan				
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan UMKM	Pendataan UMKM	Pendataan UMKM	Pendataan UMKM
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kegiatan Operasional, monitoring dan evaluasi terkait perguliran BLUD KUMKM dan audit eksternal BLUD	Kegiatan Operasional, monitoring dan evaluasi terkait perguliran BLUD KUMKM dan audit eksternal BLUD	Kegiatan Operasional, monitoring dan evaluasi terkait perguliran BLUD KUMKM dan audit eksternal BLUD	Kegiatan Operasional, monitoring dan evaluasi terkait perguliran BLUD KUMKM dan audit eksternal BLUD
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk UMKM (NIB, P-IRT, Halal, Ijin edar, Barcode dan HKI)	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk UMKM (NIB, P-IRT, Halal, Ijin edar, Barcode dan HKI)	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk UMKM (NIB, P-IRT, Halal, Ijin edar, Barcode dan HKI)	Fasilitasi perijinan dan sertifikasi produk UMKM (NIB, P-IRT, Halal, Ijin edar, Barcode dan HKI)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM, berupa sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mengakses permodalan	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM, berupa sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mengakses permodalan	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM, berupa sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mengakses permodalan	Fasilitasi perkuatan permodalan bagi UMKM, berupa sosialisasi dan pendampingan UMKM untuk mengakses permodalan
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan bagi wira usaha pemula untuk menumbuhkan UMKM	Pelatihan kewirausahaan bagi wira usaha pemula untuk menumbuhkan UMKM	Pelatihan kewirausahaan bagi wira usaha pemula untuk menumbuhkan UMKM	Pelatihan kewirausahaan bagi wira usaha pemula untuk menumbuhkan UMKM

<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (DAK)	Optimalisasi PLUT	Optimalisasi PLUT	Optimalisasi PLUT
<b>3.30.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>				
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan/re vitalisasi ruko, kios, dan los serta sarana pendukungnya	Pembangunan/re vitalisasi ruko, kios, dan los serta sarana pendukungnya	Pembangunan/re vitalisasi ruko, kios, dan los serta sarana pendukungnya	Pembangunan/re vitalisasi ruko, kios, dan los serta sarana pendukungnya
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan sarana perdagangan bagi UMKM	Penyediaan sarana perdagangan bagi UMKM	Penyediaan sarana perdagangan bagi UMKM	Penyediaan sarana perdagangan bagi UMKM
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya				
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Optimalisasi pengelolaan pasar, honor tenaga kebersihan, penyediaan sarana kebersihan, serta optimalisasi kinerja pengelola pasar untuk mencapai target PAD	Optimalisasi pengelolaan pasar, honor tenaga kebersihan, penyediaan sarana kebersihan, serta optimalisasi kinerja pengelola pasar untuk mencapai target PAD	Optimalisasi pengelolaan pasar, honor tenaga kebersihan, penyediaan sarana kebersihan, serta optimalisasi kinerja pengelola pasar untuk mencapai target PAD	Optimalisasi pengelolaan pasar, honor tenaga kebersihan, penyediaan sarana kebersihan, serta optimalisasi kinerja pengelola pasar untuk mencapai target PAD
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan petugas kebersihan pasar dalam mengolah sampah menjadi lebih bersih dan bernilai ekonomi	Pengelolaan petugas kebersihan pasar dalam mengolah sampah menjadi lebih bersih dan bernilai ekonomi	Pengelolaan petugas kebersihan pasar dalam mengolah sampah menjadi lebih bersih dan bernilai ekonomi	Pengelolaan petugas kebersihan pasar dalam mengolah sampah menjadi lebih bersih dan bernilai ekonomi
<b>3.30.04.</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota				

3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pelaksanaan pemantauan stok sembako, koordinasi ketersediaan stok dan harga barang	Pelaksanaan pemantauan stok sembako, koordinasi ketersediaan stok dan harga barang	Pelaksanaan pemantauan stok sembako, koordinasi ketersediaan stok dan harga barang	Pelaksanaan pemantauan stok sembako, koordinasi ketersediaan stok dan harga barang
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Operasi pasar	Operasi pasar	Operasi pasar	Operasi pasar
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Pengawasan legalitas distributor, koordinasi permasalahan seputar kelembagaan maupun hal lainnya terhadap distributor pupuk dan pestisida	Pengawasan legalitas distributor, koordinasi permasalahan seputar kelembagaan maupun hal lainnya terhadap distributor pupuk dan pestisida	Pengawasan legalitas distributor, koordinasi permasalahan seputar kelembagaan maupun hal lainnya terhadap distributor pupuk dan pestisida	Pengawasan legalitas distributor, koordinasi permasalahan seputar kelembagaan maupun hal lainnya terhadap distributor pupuk dan pestisida
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan ketersediaan, penyaluran dan ketepatan penerima manfaat pupuk dan pestisida ditingkat kios, maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam hal monev penyaluran ditingkat petani	Pengawasan ketersediaan, penyaluran dan ketepatan penerima manfaat pupuk dan pestisida ditingkat kios, maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam hal monev penyaluran ditingkat petani	Pengawasan ketersediaan, penyaluran dan ketepatan penerima manfaat pupuk dan pestisida ditingkat kios, maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam hal monev penyaluran ditingkat petani	Pengawasan ketersediaan, penyaluran dan ketepatan penerima manfaat pupuk dan pestisida ditingkat kios, maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam hal monev penyaluran ditingkat petani
<b>3.30.06.</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang serta kalibrasi alat UTTP	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang serta kalibrasi alat UTTP	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang serta kalibrasi alat UTTP	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang serta kalibrasi alat UTTP
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Sosialisasi UTTP di tingkat pedagang pasar, pengawasan UTTP, serta koordinasi seputar UTTP	Sosialisasi UTTP di tingkat pedagang pasar, pengawasan UTTP, serta koordinasi seputar UTTP	Sosialisasi UTTP di tingkat pedagang pasar, pengawasan UTTP, serta koordinasi seputar UTTP	Sosialisasi UTTP di tingkat pedagang pasar, pengawasan UTTP, serta koordinasi seputar UTTP
<b>3.30.07.</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				
<b>3.30.07.2.01</b>	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				

<b>3.30.07.2.01.01</b>	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pameran tingkat nasional maupun daerah	Pameran tingkat nasional maupun daerah	Pameran tingkat nasional maupun daerah	Pameran tingkat nasional maupun daerah
<b>3.30.07.2.01.02</b>	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Perjalanan dinas dalam rangka promosi produk UMKM ke pasar modern, ritel dan distributor lainnya. Fasilitasi penyusunan Katalog Produk UMKM serta fasilitas produk UMKM masuk ke e-katalog nasional	Perjalanan dinas dalam rangka promosi produk UMKM ke pasar modern, ritel dan distributor lainnya. Fasilitasi penyusunan Katalog Produk UMKM serta fasilitas produk UMKM masuk ke e-katalog nasional	Perjalanan dinas dalam rangka promosi produk UMKM ke pasar modern, ritel dan distributor lainnya. Fasilitasi penyusunan Katalog Produk UMKM serta fasilitas produk UMKM masuk ke e-katalog nasional	Perjalanan dinas dalam rangka promosi produk UMKM ke pasar modern, ritel dan distributor lainnya. Fasilitasi penyusunan Katalog Produk UMKM serta fasilitas produk UMKM masuk ke e-katalog nasional
<b>3.31.02.</b>	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
<b>3.31.02.2.01</b>	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
<b>3.31.02.2.01.03</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Pembinaan IKM, Pelatihan, TPL, evaluasi dokumen RPIK, pelaksanaan dokumen RPIK	Pembinaan IKM, Pelatihan, TPL, evaluasi dokumen RPIK, pelaksanaan dokumen RPIK	Pembinaan IKM, Pelatihan, TPL, evaluasi dokumen RPIK, pelaksanaan dokumen RPIK	Pembinaan IKM, Pelatihan, TPL, evaluasi dokumen RPIK, pelaksanaan dokumen RPIK
<b>3.31.02.2.01.04</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Bantuan Alat Produksi, pengembangan sentra IKM, optimalisasi lamban kemasan	Bantuan Alat Produksi, pengembangan sentra IKM, optimalisasi lamban kemasan	Bantuan Alat Produksi, pengembangan sentra IKM, optimalisasi lamban kemasan	Bantuan Alat Produksi, pengembangan sentra IKM, optimalisasi lamban kemasan
<b>3.31.02.2.01.05</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Peningkatan kemitraan pengembangan IKM	Peningkatan kemitraan pengembangan IKM	Peningkatan kemitraan pengembangan IKM	Peningkatan kemitraan pengembangan IKM

## 5.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang mencakup indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Result/Outcomes*) dan Manfaat (*Benefit*) serta Dampak (*Impact*) dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah :

- a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan;

Indikator Kinerja terhadap berbagai Program dan Kegiatan pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang telah direncanakan pada Rencana Strategis Badan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel Renstra ini.

### **5.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Koperasi dan UKM;
- b. Pelaku Usaha Perdagangan;
- c. Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah;

### **5.4 Pendanaan Indikatif.**

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun ke Lima Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sejumlah **Rp. 412.213.653.925,- (Empat Ratus Dua Belas Milyar Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam rentang waktu 4 (tahun) Tahun (2023-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat. Indikator Kinerja terdiri atas Indikator Kinerja Strategis OPD dan Indikator Kinerja Utama OPD sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :



**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
			(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	% Koperasi yang sehat	16,36%	30%	32%	33%	34%	34%
2.	Persentase Pertumbuhan UMKM	46,96%	10%	20%	30%	40%	40%
3.	% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	0%	3%	6%	9%	12%	12%
4.	PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	870.032	923.273	941.73	960.56	979.77	979.77
5.	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	351.350	358.376	380.33	387.93	395.68	395.68

**Tabel 7.2****Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode
			(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	% Koperasi yang sehat	16,36%	30%	32%	33%	34%	34%
2.	Persentase Pertumbuhan UMKM	46,96%	10%	20%	30%	40%	40%
3.	% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	0%	3%	6%	9%	12%	12%
4.	PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	870.032	923.273	941.73	960.56	979.77	979.77
5.	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	351.350	358.376	380.33	387.93	395.68	395.68

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2023-2023

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat yang nantinya menjadi dasar Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah selama empat tahun kedepan.

KEPALA DINAS  
KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN LAMPUNG BARAT

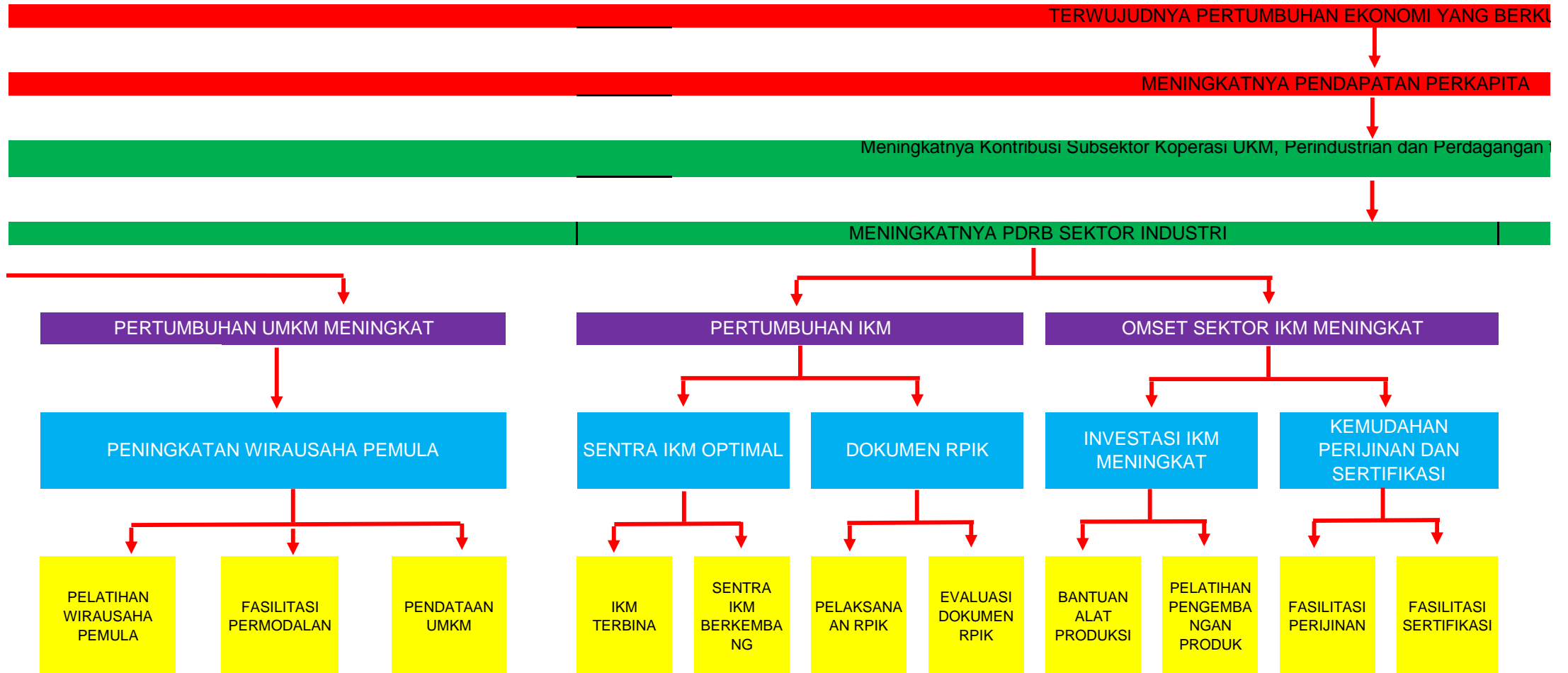


TRI UMARYANI, S.P.,M.Si.  
NIP. 19761229 199902 2 001

LAMPIRAN I



LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA  
DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAG.  
TAHUN 2023-2026



ANGAN

KUALITAS SARPRAS PERDAGANGAN

KUALITAS SARPRAS PERDAGANGAN

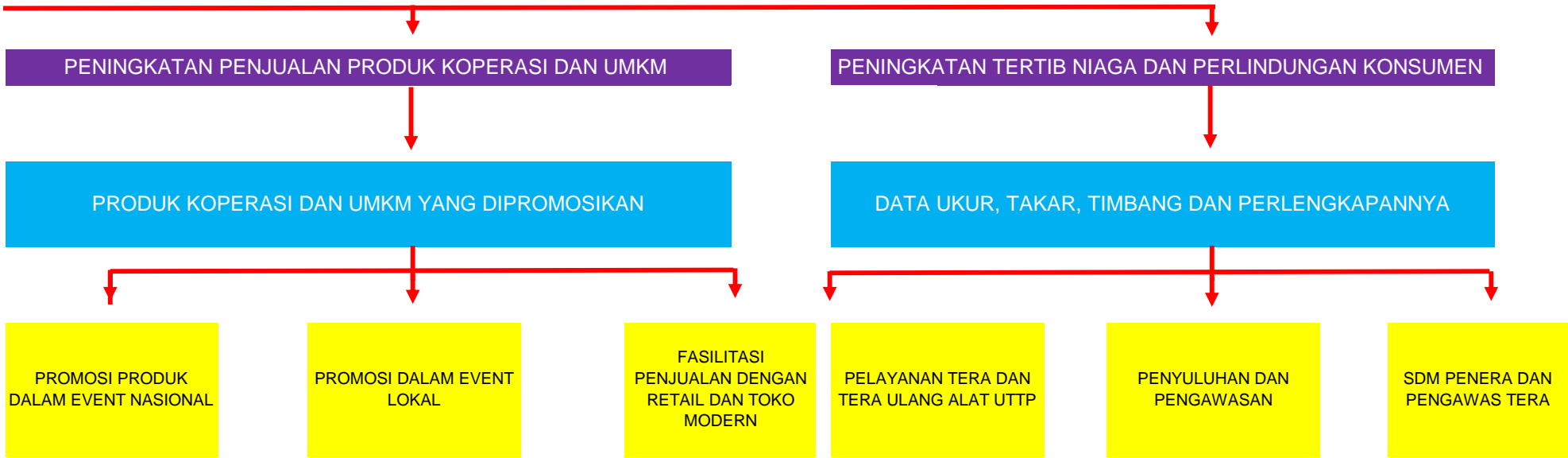
terhadap Pendapatan Perkapita

MENINGKATNYA PDRB SEKTOR





OR PERDAGANGAN

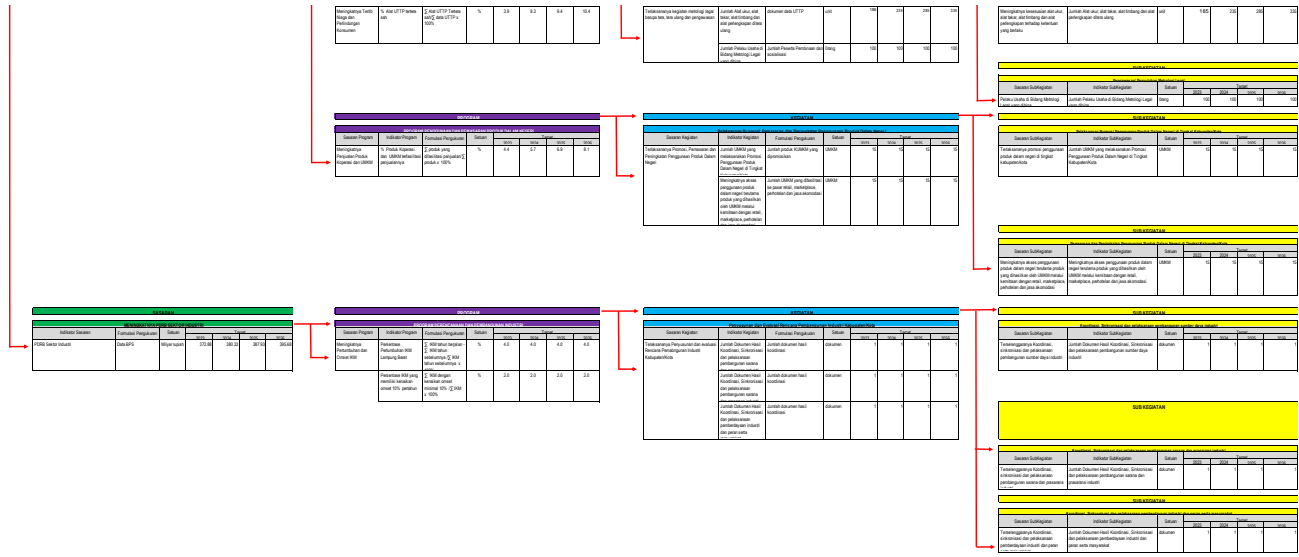












Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kontribusi Subsektor Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pendapatan Perkabita				% Koperasi yang sehat	16.36%	16.36%	30%	5,254,619,400	32%	4,955,024,290	33%	5,950,106,719	34%	6,545,062,391	34%	22,704,812,800		
				% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	0.00%	0.00%	3.00%		6.00%		9.00%		12.00%		12.00%			
				% Peningkatan Jumlah UMKM	46.96%	46.96%	10%		20%		30%		40%		40%			
				PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)	870,031	870,032	887,433	77,863,500,000	905,181	85,581,750,000	923,285	94,147,267,000	941,751	1,137,785,000	941,751	361,041,517,125		
			PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	351,350	351,350	358,377	6,125,000,000	365,544	6,737,500,000	372,855	7,411,250,000	380,312	8,152,375,000	380,312	28,426,125,000			
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM				% Koperasi yang sehat	16.36%	16.36%	30%	329,340,500	32%	159,500,000	33%	175,500,000	34%	192,995,000	34%	857,335,500		
				% Produk UMKM yang memenuhi standarisasi	0.00%	0.00%	3.00%	4,925,278,900	6.00%	4,795,524,290	9.00%	5,774,606,719	12.00%	6,352,067,391	12.00%	21,847,477,300		
				% Pertumbuhan UMKM	46.96%	46.96%	10%		20%		30%		40%		40%			
NON URUSAN																		
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	77,91	77,91	77.92	3,945,203,900	77.93	4,309,324,290	77.94	4,740,256,719	77.95	5,214,282,391	77.95	18,209,067,300	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52 dokumen	52 dokumen	11 dokumen	14,000,000	8 dokumen	18,200,000	11 dokumen	20,020,000	8 dokumen	22,022,000	38 dokumen	74,242,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		20 dokumen			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		40 dokumen			
		2.17.01.2.0.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52 dokumen	52 dokumen	11 dokumen	2,000,000	11 dokumen	5,000,000	11 dokumen	5,500,000	11 dokumen	6,050,000	44 dokumen	18,550,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,200,000	1 dokumen	2,420,000	1 dokumen	2,662,000	4 dokumen	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0.1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,200,000	1 dokumen	2,420,000	1 dokumen	2,662,000	4 dokumen	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0.1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,200,000	1 dokumen	2,420,000	1 dokumen	2,662,000	4 dokumen	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat

		2.17.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,200,000	1 dokumen	2,420,000	1 dokumen	2,662,000	4 dokumen	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan	2,000,000	1 laporan	2,200,000	1 laporan	2,420,000	1 laporan	2,662,000	4 laporan	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,200,000	12 laporan	2,420,000	12 laporan	2,662,000	38 laporan	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	35 orang/bulan	2,979,193,900	35 orang/bulan	3,277,113,290	35 orang/bulan	3,604,824,619	35 orang/bulan	3,965,307,081	35 orang/bulan	13,826,438,890	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			
				Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		2.17.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	31 orang/bulan	35 orang/bulan	2,973,693,900	35 orang/bulan	3,271,063,290	35 orang/bulan	3,598,169,619	35 orang/bulan	3,957,986,581	35 orang/bulan	13,800,913,390	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan	2,500,000	1 laporan	2,750,000	1 laporan	3,025,000	1 laporan	3,327,500	4 laporan	11,602,500	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 laporan	1,000,000	4 laporan	1,100,000	4 laporan	1,210,000	4 laporan	1,331,000	16 laporan	4,641,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	8 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,200,000	1 dokumen	2,420,000	1 dokumen	2,662,000	4 dokumen	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	12,990,000	1 dokumen	14,089,000	1 dokumen	15,497,900	1 dokumen	17,047,690	4 dokumen	59,624,590	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	2,000,000	4 dokumen	8,000,000		
		2.17.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	10,990,000	1 dokumen	12,089,000	1 dokumen	13,297,900	1 dokumen	14,627,690	4 dokumen	51,004,590	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	25,000,000	2 dokumen	27,500,000	2 dokumen	30,250,000	2 dokumen	33,275,000	8 dokumen	116,025,000	Dinas Koperindag	
				Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		8 orang		Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 5.09	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	15,000,000	2 dokumen	16,500,000	2 dokumen	18,150,000	2 dokumen	19,965,000	8 dokumen	69,615,000		
		2.17.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	2 orang	10,000,000	2 orang	11,000,000	2 orang	12,100,000	2 orang	13,310,000	8 orang	46,410,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat

		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	3 paket	345,020,000	3 paket	379,522,000	3 paket	417,474,200	3 paket	459,221,620	12 paket	1,601,237,820	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	1 paket		2 paket		2 paket		2 paket		8 paket			
				Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		8 paket			
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	16 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		16 dokumen			
				Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		48 laporan			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	3 paket	2,200,000	3 paket	2,420,000	3 paket	2,662,000	3 paket	2,928,200	12 paket	10,210,200	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	1 paket	50,000,000	2 paket	55,000,000	2 paket	60,500,000	2 paket	66,550,000	8 paket	232,050,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	8 paket	2 paket	65,000,000	2 paket	71,500,000	2 paket	78,650,000	2 paket	86,515,000	8 paket	301,665,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	16 dokumen	16 dokumen	4 dokumen	95,220,000	4 dokumen	104,742,000	4 dokumen	115,216,200	4 dokumen	126,737,820	16 dokumen	441,916,020	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	4 laporan	4 laporan	12 laporan	7,600,000	12 laporan	8,360,000	12 laporan	9,196,000	12 laporan	10,115,600	48 laporan	35,271,600	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	12 laporan	125,000,000	12 laporan	137,500,000	12 laporan	151,250,000	12 laporan	166,375,000	48 laporan	580,125,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	7 unit	7 unit	5 paket	95,000,000	4 paket	71,500,000	5 paket	78,650,000	5 paket	86,515,000	19 paket	331,665,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	2 paket	2 paket	1 paket	30,000,000	0 paket	-	1 paket	33,000,000	1 paket	36,300,000	3 paket	99,300,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	6 unit	30,000,000	2 unit	33,000,000	2 unit	36,300,000	2 unit	39,930,000	12 paket	139,230,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	7 unit	7 unit	1 unit	35,000,000	2 unit	38,500,000	2 unit	42,350,000	2 unit	46,585,000	7 unit	162,435,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	12 laporan	224,000,000	12 laporan	246,400,000	12 laporan	271,040,000	12 laporan	298,144,000	48 laporan	1,039,584,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	4 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		48 laporan			
				Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan	48 laporan	12 laporan		48 laporan			
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	4 laporan	12 laporan	2,000,000	12 laporan	2,200,000	12 laporan	2,420,000	12 laporan	2,662,000	48 laporan	9,282,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	4 laporan	12 laporan	62,000,000	12 laporan	68,200,000	12 laporan	121,000,000	12 laporan	133,100,000	48 laporan	384,300,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	4 laporan	12 laporan	160,000,000	12 laporan	176,000,000	12 laporan	193,600,000	12 laporan	212,960,000	48 laporan	742,560,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	29 unit	29 unit	36 unit	215,000,000	38 unit	236,500,000	36 unit	260,150,000	38 unit	286,165,000	148 unit	997,815,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat

		2.17.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	11 unit	11 unit	150,000,000	11 unit	165,000,000	11 unit	181,500,000	11 unit	199,650,000	11 unit	696,150,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	14 unit	30,000,000	14 unit	33,000,000	14 unit	36,300,000	14 unit	39,930,000	56 unit	139,230,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	35,000,000	3 unit	38,500,000	3 unit	42,350,000	3 unit	46,585,000	3 unit	162,435,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.0 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penguji pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	35,000,000	1 unit kerja	38,500,000	1 unit kerja	42,350,000	1 unit kerja	46,585,000	1 unit kerja	162,435,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.01.2.1 0.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penguji pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	35,000,000	1 unit kerja	38,500,000	1 unit kerja	42,350,000	1 unit kerja	46,585,000	1 unit kerja	162,435,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi aktif</b>	30.3%	30.3%	33%	100,000,000	34%	110,000,000	35%	121,000,000	36%	133,100,000	36%	464,100,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.03.2.0 1	Pemerkasaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	39 unit usaha	39 unit usaha	50 unit usaha	100,000,000	53 unit usaha	110,000,000	50 unit usaha	121,000,000	0.00%	133,100,000	60 unit usaha	464,100,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.03.2.0 1.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	52 unit usaha	52 unit usaha	50 unit usaha	100,000,000							60 unit usaha	100,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.03.2.0 1.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	52 unit usaha	52 unit usaha	50 unit usaha		53 unit usaha	110,000,000	58 unit usaha	121,000,000	60 unit usaha	133,100,000	60 unit usaha	364,100,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase koperasi yang menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan usahanya</b>	0%	0%	2%	229,340,500	4%	49,500,000	6%	54,500,000	8%	59,895,000	8%	393,235,500	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.05.2.0 1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	18.18%	18.18%	4.04%	229,340,500	4.04%	49,500,000	4.04%	54,500,000	4.04%	59,895,000	16.16%	393,235,500	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.05.2.0 1.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	90 orang	90 orang	80 orang	229,340,500	20 orang	49,500,000	20 orang	54,500,000	20 orang	59,895,000	80 orang	393,235,500	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDYAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang peningkatan SHU mencapai 5%</b>	6.06%	6.06%	9%	80,000,000	12%	-	15%	-	18%	-	18%	80,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.06.2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	0 orang	0 orang	45 orang	80,000,000	0	-	0	-	0	-	45 orang	80,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat

		2.17.06.2.0 1.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	0 orang	0 orang	45 orang	80,000,000						45 orang	80,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat	
		2.17.06.2.0 1.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	0 orang	0 orang			45 orang	88,000,000	45 orang	96,800,000	45 orang	106,480,000	180 orang	291,280,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UMKM terfasilitasi</b>	10.00%	10.00%	3.00%	980,075,000	6.00%	486,200,000	9.00%	1,034,350,000	12.00%	1,137,785,000	12.00%	3,638,410,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				<b>Persentase wirausaha pemula</b>	0.45%	0.45%	0.75%		1.00%		1.25%	1.50%		1.50%				
		2.17.07.2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah usaha mikro terdata	8,747 unit usaha	8,747 unit usaha	9,622 unit usaha	980,075,000	10,584 unit usaha	486,200,000	11,642 unit usaha	1,034,350,000	12,806 unit usaha	1,137,785,000	12,806 unit usaha	3,638,410,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	38 unit usaha	38 unit usaha	10 unit usaha		10 unit usaha		10 unit usaha		10 unit usaha		40 unit usaha			
				Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha		27 unit usaha		29 unit usaha		30 unit usaha		111 unit usaha			
				Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	812 unit usaha	812 unit usaha	330 unit usaha		361 unit usaha		363 unit usaha		365 unit usaha		1,419 unit usaha			
				Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	40 orang	40 orang	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		100 orang			
		2.17.07.2.0 1.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	8,767 unit usaha	8,747 unit usaha	9,622 unit usaha	200,000,000							9,622 unit usaha	200,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.07.2.0 1.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	38 unit usaha	38 unit usaha	10 unit usaha	135,000,000	10 unit usaha	148,500,000	10 unit usaha	163,350,000	10 unit usaha	179,685,000	40 unit usaha	626,535,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.07.2.0 1.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah mendapatkan	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	50,000,000	27 unit usaha	55,000,000	29 unit usaha	60,500,000	30 unit usaha	66,550,000	111 unit usaha	232,050,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.07.2.0 1.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha mikro	812 unit usaha	812 unit usaha	330 unit usaha	207,000,000	361 unit usaha	227,700,000	500 unit usaha	750,000,000	500 unit usaha	825,000,000	1,419 unit usaha	2,009,700,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.07.2.0 1.05	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	8,767 unit usaha	8,747 unit usaha			10,584 unit usaha	220,000,000	11,642 unit usaha	242,000,000	12,806 unit usaha	266,200,000	12,806 unit usaha	728,200,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat

		2.17.07.2.0 1.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	40 orang	40 orang	100 orang	388,075,000	25 orang	55,000,000	25 orang	60,500,000	25 orang	66,550,000	100 orang	570,125,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase wirausaha pemula</b>	0.45%	0.45%	0.25%	7,891,000,000						0.25%			Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.08.2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.500 unit usaha	1.500 unit usaha	500 unit usaha	7,891,000,000						- 500 unit usaha	7,891,000,000		Dinas Koperindag	Lampung Barat
		2.17.08.2.0 1.01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.500 unit usaha	1.500 unit usaha	500 unit usaha	7,891,000,000						- 500 unit usaha	7,891,000,000		Dinas Koperindag	Lampung Barat
	<b>Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan</b>			<b>PDRB Sektor Perdagangan (milyar rupiah)</b>	<b>870,031</b>	<b>870,032</b>	<b>887,433</b>	<b>77,863,500,000</b>	<b>905,181</b>	<b>85,581,750,000</b>	<b>923,285</b>	<b>94,147,267,000</b>	<b>941,751</b>	<b>103,449,000,125</b>	<b>941,751</b>	<b>361,041,517,125</b>	<b>Dinas Koperindag</b>	<b>Lampung Barat dan Luar Kabupaten</b>
		3.30.03.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase los, kios dan ruko yang direvitalisasi</b>	11.69%	11.69%	20.00%	76,695,000,000	40.00%	84,364,500,000	60.00%	92,800,950,000	80.00%	102,081,045,000	80.00%	355,941,495,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 unit	52 unit	2 unit	76,530,000,000	2 unit	84,183,000,000	2 unit	92,601,300,000	2 unit	101,861,430,000	8 unit	355,175,730,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	271 unit	271 unit	5 unit		5 unit		5 unit	5 unit		20 unit				
		3.30.03.2.0 1.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	52 unit	52 unit	2 unit	76,500,000,000	2 unit	84,150,000,000	2 unit	92,565,000,000	2 unit	101,821,500,000	8 unit	355,036,500,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.03.2.0 1.02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	271 unit	271 unit	5 unit	30,000,000	5 unit	33,000,000	5 unit	36,300,000	5 unit	39,930,000	20 unit	139,230,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.03.2.0 2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	165,000,000	1 dokumen	181,500,000	1 dokumen	199,650,000	1 dokumen	219,615,000	4 dokumen	765,765,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	135,000,000	1 dokumen	148,500,000	1 dokumen	163,350,000	1 dokumen	179,685,000	4 dokumen	626,535,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.03.2.0 2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	33,000,000	1 dokumen	36,300,000	1 dokumen	39,930,000	4 dokumen	139,230,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.04.	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting</b>	0.14%	0.14%	3%	550,000,000	3%	535,000,000	3%	590,000,000	3%	625,000,000	3%	2,300,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat



		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	438,575,000	1 Laporan	405,000,000	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	475,000,000	4 Laporan	1,768,575,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		48 Laporan		192 Laporan			
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	4 Laporan	4 Laporan	48 Laporan	72,900,000	48 Laporan	65,000,000	48 Laporan	70,000,000	48 Laporan	75,000,000	192 Laporan	282,900,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	365,675,000	1 Laporan	340,000,000	1 Laporan	380,000,000	1 Laporan	400,000,000	4 Laporan	1,485,675,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	111,425,000	1 dokumen	130,000,000	1 dokumen	140,000,000	1 dokumen	150,000,000	4 dokumen	531,425,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	0 laporan	0 laporan	5 laporan		5 laporan		5 laporan		5 laporan		20 laporan			
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen Kelengkapan Legalitas Legalitas Dokumen Perizinan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	51,425,000	1 dokumen	65,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	75,000,000	4 dokumen	261,425,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	0 laporan	0 laporan	5 laporan	60,000,000	5 laporan	65,000,000	5 laporan	70,000,000	5 laporan	75,000,000	20 laporan	270,000,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.06.	<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>% Alat UTPP tertera sah</b>	11.71%	11.71%	3.99%	238,500,000	5.07%	270,250,000	6.15%	306,117,000	7.20%	248,235,125	22.46%	1,063,102,125	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	542 unit	542 unit	185 unit	238,500,000	235 unit	270,250,000	285 unit	306,117,000	335 unit	248,235,125	1.640 unit	1,063,102,125	Dinas Koperindag	Lampung Barat
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	400 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		400 orang			
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	542 unit	542 unit	185 unit	155,500,000	235 unit	178,250,000	285 unit	204,987,000	335 unit	235,735,125	1.640 unit	774,472,125	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	400 orang	400 orang	100 orang	83,000,000	100 orang	92,000,000	100 orang	101,130,000	100 orang	12,500,000	400 orang	288,630,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat
		3.30.07.	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya</b>	3.28%	3.28%	4.40%	380,000,000	5.70%	412,000,000	6.90%	450,200,000	8.10%	494,720,000	25.10%	1,736,920,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat dan Luar Kabupaten
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM	380,000,000	18 UMKM	412,000,000	21 UMKM	450,200,000	24 UMKM	494,720,000	208 produk	1,736,920,000	Dinas Koperindag	Lampung Barat dan Luar Kabupaten
				Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	9 UMKM	9 UMKM	15 UMKM		18 UMKM		21 UMKM		24 UMKM					





Catatan kecil

412,172,454,925                      89,243,119,400 #####

kop sehat 27, jlh kop 165

kop sehat 27,  
jlh kop 165

Jlh produk yang memiliki standar dibagi  
jumlah produk dikali 100%. Total jlh produk  
823 produk

46,96

-

87,504,000

220,000

3598169619



30.3030303

495 18.18181818 jumlah  
pengurus  
dilatih dibagi  
jumlah  
pengurus  
dikali 100  
persen

jumlah umkm yang difasilitasi perizinan dan sertifikasi, ditambah umkm yang terfasilitasi pembiayaan dibagi jumlah UMKM dikali 100%

jumlah SDM dilatih kewirus dibagi jlh UMKM dikali 100%

Jumlah produk KUMKM yang memiliki standar perizinan dan sertifikasi

data UMKM naik 10%

BLUD

cat : Perizinan dan sertifikasi produk

SIKP

sertif : P IRT,  
halal, MD,HKI



Pelatihan wirausaha pemula

8680100000

**Data BPS**

jumlah 445 unit

0.224719101

Kios, los, ruko, DAK Perdag

Tenda gerobak

kebersihan dan pengelola pasar

pemberdayaan

1,730,000 780,000

2,600

jumlah produk yang difasilitasi penjualan  
dibagi jlh produk dikali 100

jlh total  
produk 823  
produk

Data BPS

Pembinaan IKM, evaluasi dokumen RPIK,  
pelaksanaan dokumen RPIK

Bantuan Alat Produksi, pengembangan  
sentra IKM, DAK IKM

Pengembangan produk, fasilitasi perijinan  
produk

